BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sebagai makhluk sosial, setiap orang pasti selalu diperhadapkan pada gejala-gejala sosial yang timbul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Gejala-gejala ini seringkali menimbulkan kesenjangan dan konflik di dalam masyarakat itu sendiri. Dengan munculnya berbagai kesenjangan dan konflik di dalam masyarakat mengakibatkan tingkat kejahatan dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum lainnya semakin meningkat. Hal ini tentunya membuat masyarakat menjadi resah dan takut akan keberlangsungan hidupnya sebagai manusia sosial yang beradab karena ketidakadilan dan ketidaknyamanan yang terus terjadi disekitarnya bahkan tidak jarang menimpa dirinya sendiri. Untuk mengontrol dan mencegah terjadinya hal-hal demikian maka perlu adanya hukum sebagai pengatur tata tertib hubungan masyarakat, mewujudkan keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat pada umumnya.

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia juga menjamin bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia berhak untuk mendapat keadilan yang termuat dalam sila ke 5 (lima) yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Ini suatu tanda bahwa seluruh masyarakat Indonesia berhak untuk

memperoleh perlakuan yang sama, mendapat kehidupan yang layak, nyaman dan bebas dari gangguan dalam menjalani kehidupannya serta berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari pemerintah.

Hukum merupakan suatu produk budaya. Karena itu hukum dapat hadir dalam masyarakat dengan bentuk budaya apapun (Marzuki, 2008). Pada dasarnya hukum berasal dari interaksi dalam masyarakat untuk menjadi pengatur dan pembatas dalam tingkah laku masyarakat itu sendiri.

Indonesia sebagai Negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah Negara hukum”. Hal ini sangat jelas bahwa di wilayah Negara Republik Indonesia hukumlah yang menjadi pengatur hubungan di dalam masyarakat agar kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik.

Pada hakekatnya hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yaitu untuk mengayomi masyarakat secara adil dan damai sehingga mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat dan juga memberikan jaminan keamanan dan ketentraman untuk masyarakat. (Tutik, 2006)

Dalam proses penegakkan hukum yang baik harusnya berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan keadilan dalam penerapannya agar tujuan hukum itu dapat tercapai.

Kenyataannya penerapan hukum di Indonesia sangat jauh dari yang diharapkan. Terjadi banyak penyimpangan dalam penerapannya sehingga membuat masyarakat kurang percaya dengan keberadaan hukum itu sendiri. Hal ini terjadi dikarenakan

wilayah Indonesia yang sangat luas membuat penerapan pelaksanaan dan penegakkan hukum kurang efektif ditambah para pihak (pejabat) dalam menjalankan tugasnya terkadang tidak berdasarkan pada hukum dan aturan yang berlaku sehingga masyarakat melihat dan menilai para pihak (pejabat) seakan-akan bermain-main dalam pelaksanaan penerapan hukum serta kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat yang membuat masyarakat kurang mengetahui dan memahami fungsi dan tujuan serta keberadaan hukum itu sendiri. Keadaan demikian yang kemudian membuat warga masyarakat tidak percaya dan serasa menutup mata dengan keberadaan hukum dan memilih melakukan suatu perbuatan tindak kejahatan sesuai dengan kemauannya seperti pembunuhan, pencurian, penipuan dan tindakan kejahatan lainnya yang akhirnya membuat mereka dijatuhi hukuman pidana atas perbuatan tindak pidana tersebut dan dimasukkan kedalam Lembaga Pemasyarakatan. Penjatuhan pidana ini pada dasarnya merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan tersebut (Panjaitan, Petrus Irwan dan Simorangkir, 1995).

Semakin banyak dan berkembangnya kejahatan di dalam masyarakat yang terus bervariasi membuat jumlah narapina semakin bertambah terus menerus, hal ini tentunya juga berdampak pada jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan karena narapina yang sudah diadili dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan diserahkan dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Keadaan demikian mendorong pemerintah membuat suatu peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak narapidana selama berada dalam lembaga

pemasyarakatan. Ini bertujuan agar selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana tetap dilindungi hak-hak asasinya dan diperlakukan selayaknya manusia yang bermartabat. Undang-undang yang dibuat pemerintah tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-undang ini yang kemudian menjadi pedoman dan tolak ukur para petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk mengurus, melindungi dan membina narapidana kearah yang lebih baik lagi dari kehidupan sebelumnya.

Lembaga Pemasyarakatan (yang selanjutnya disebut Lapas) merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dahulu dikenal Departemen Kehakiman (Panjaitan, Petrus Irwan dan Simorangkir, 1995). Penghuni Lapas ini pada umumnya adalah narapidana. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Pemasyarakatan ini bertujuan membina narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.

Mengenai tujuan hukum pidana ini dikenal 2 (dua) aliran yaitu aliran klasik dan aliran modern. Menurut aliran klasik, hukum pidana bertujuan untuk menakut-nakuti

setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik sedangkan menurut aliran modern, hukum pidana bertujuan untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (Prasetyo, 2013).

Aliran modern inilah yang kemudian terus berkembang karena sesuai dan sejalan dengan hak asasi manusia (HAM) yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi (Sabon, 2014):

“ Ham adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Aliran modern ini lebih mengedepankan untuk mendidik narapidana kearah yang lebih baik, tidak hanya semata-mata untuk menegakkan keadilan bagi para pencari keadilan tetapi beranggapan bahwa keadaan penjahat (narapidana) juga perlu dan harus untuk diperhatikan.

Aliran modern ini juga berupaya melihat bahwa narapidana perlu untuk dibina supaya ketika kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani masa hukuman pidananya, masyarakat dapat menerimanya kembali serta tidak melakukan perbuatan tindak pidana lagi dikemudian hari.

Untuk mencapai tujuan inilah narapidana dimasukkan di dalam Lapas untuk menjalani hukuman pidana atas perbuatan yang telah ia lakukan, didalam Lapas ini yang kemudian menjadi tempat dimana dilakukan pembinaan bagi narapidana.

Tujuan pembinaan ini pada dasarnya untuk memperbaiki diri narapidana supaya tidak mengulangi perbuatannya kembali dan dapat menjadi manusia seutuhnya yang dapat hidup dan berinteraksi dengan masyarakat lagi nantinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mahfud (ISSN 1412-5325) yang berjudul “Refungsionalisasi Lembaga Pemasyarakatan Pasca Gempa Bumi Dan Tsunami (Suatu Penelitian di Banda Aceh dan Aceh Besar)” menyebutkan bahwa (Mahfud, 2007):

“Pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan-pendekatan memantapkan iman (ketahanan mental) dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya”

Pada kenyataannya warga binaan yang ada di dalam Lapas masih belum jera akan sanksi hukum yang diterimanya, hal ini dapat jelas terlihat dari tingkah laku dan perbuatan warga binaan yang masih melakukan perbuatan dan tindak pidana selama berada di dalam Lapas, seperti kabur dari Lapas, melakukan pengedaran narkoba, pekelahian sesama penghuni Lapas, pembunuhan, pengeroyokan dan berbagai tindak pidana lainnya. Hal ini tentunya menjadi masalah yang sangat serius yang perlu diperhatikan dan ditangani secara serius oleh Lapas. Karena Lapas merupakan proses akhir dari serangkaian sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana (Mulyadi, 2010).

Sebagai lembaga yang menjadi proses akhir dari sistem pemidanaan, Lapas memiliki tanggungjawab yang sangat besar untuk mewujudkan tercapainya tujuan hukum bagi narapidana yang sedang berada di dalam Lapas sehingga pada saat

narapidana bebas dan selesai menjalani hukumannya, ia dapat kembali dilingkungan masyarakat sebagai pribadi baru yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan tindak pidana lagi. Untuk itu Lapas harus lebih memikirkan cara-cara dan strategi untuk melakukan pembinaan yang tepat terhadap penghuni Lapas sehingga penghuni Lapas dapat menjadi lebih baik lagi dari kehidupan sebelumnya. Hal ini tentunya juga dapat mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana atau yang lebih dikenal dengan istilah *residive*. Pengulangan tindak pidana (*residive*) merupakan perbuatan kambuhan narapidana yang perlu dan harus menjadi perhatian khusus petugas Lapas dalam menjalani pembinaan kepada warga binaan selama berada di Lapas. Ini dikarenakan jika penghuni Lapas terus melakukan pengulangan tindak pidana, maka pembinaan yang dilakukan kepada narapidana selama berada di Lapas tidak ada gunanya.

Untuk mencegah pengulangan tindak pidana ini maka dilakukan pembinaan kepada narapidana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Umi Enggarsasi (ISSN 1410-3648) yang berjudul “Pola Pembinaan Narapidana Dalam Memberikan Kontribusi Keberhasilan Pembinaan Narapidana di Indonesia” menyebutkan bahwa pola pembinaan narapidana dapat dilakukan sebagai berikut:

”pembinaan narapidana harus banyak menyediakan alternatif metode pembinaan yang dapat dijadikan pilihan untuk menghadapi masing-masing latar belakang dan karakter narapidana yang berbeda-beda. Pembina tidak dapat menyamaratakan antar metode pembinaan karena narapidana pada umumnya memiliki latar belakang dan karakter yang heterogen. Demikian juga dengan situasi dan kondisi lingkungan lembaga pemasyarakatan. pembinaan yang efektif di samping memperhatikan latar belakang dan karakter narapidana juga harus memperhatikan situasi dan kondisi tempat pembinaan dilaksanakan,

situasi dan kondisi yang kondusif akan menunjang efektifitas pembinaan.”(Enggarsasi, 2013).

Pengulangan tindak pidana (*residive*) ini juga terjadi di kota Batam, pengulangan tindak pidana yang terjadi di kota Batam merupakan pengulangan tindak pidana seperti percurian, penipuan, pembunuhan dan berbagai tindak kriminal lainnya. Pengulangan tindak pidana ini tidak terlepas dari proses pembinaan warga binaan yang dilakukan oleh petugas Lapas selama warga binaan berada di Lapas, baik buruknya tingkah laku seseorang yang baru siap menjalani hukuman pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan kepadanya sangat erat kaitannya dengan Lapas, karena selama berada di dalam Lapas warga binaan dididik dan dirubah katakturnya supaya menjadi lebih baik lagi dari keadaan sebelumnya. Namun pada kenyataanya pembinaan yang dilakukan kepada warga binaan selama berada di dalam Lapas tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga masih banyak pelaku-pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang baru saja keluar dan bebas dari Lapas, terkadang para pelakunya melakukan tindak pidana hanya selang beberapa bulan setelah keluar dari Lapas bahkan sangat disayangkan para pelakunya terkadang masih dalam tahap percobaan untuk bebas. Keadaan demikian juga dialami oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam (yang selanjutnya disebut Lapas Kelas IIA Batam) yang merupakan salah satu Lapas yang ada di kota Batam, bahkan pengulangan tindak pidana ini sangat mungkin terjadi dikarenakan penghuni Lapas Kelas IIA Batam melebihi kapasitas penghuni, yang mana penghuni Lapas Kelas IIA Batam kurang lebih mencapai 1220 orang penghuni sedangkan kapasitas penghuni

Lapas Kelas IIA Batam yang seharusnya hanya dapat menampung kurang lebih 411 orang narapidana.

Keadaannya ini yang kemudian menjadi salah satu pemicu pembinaan narapidana yang dilakukan petugas Lapas untuk mencegah pengulangan tindak pidana oleh narapida dilingkungan Lapas Kelas IIA Batam tidak berjalan dengan baik, terlebih lagi kurangnya pengawasan dan kurangnya pembaharuan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem pembinaan narapidana dalam hal mencegah pengulangan terjadinya tindak pidana.

Beranjak dari latar belakang di atas hal ini yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BATAM)**. Semoga dengan dibuatnya skripsi ini dapat memberikan perubahan yang lebih baik khususnya di Lapas kelas IIA Batam.

1.2. Identifikasi Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mencoba mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini

1. Pembinaan warga binaan masih belum berjalan dengan baik sehingga masih banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana yang baru bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.
2. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam mencapai kurang lebih 1220 orang sedangkan kapasitas hunia hanya dapat menampung kurang lebih 411 orang.

1.3. Pembatasan Masalah

Adapun maksud pembatasan masalah dalam penelitian ini agar menjadi jelas, terarah dan tidak menjadi terlalu luas untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini:

1. Dalam penelitian ini yang diteliti hanya ruang lingkup tentang pencegahan pengulangan tindak pidana
2. Dalam penelitian ini hanya dilakukan terhadap warga binaan yang melakukan pengulangan tindak pidana dan tidak termasuk warga binaan lainnya seperti anak didik pemasyarakatan, anak pidana, anak Negara, anak sipil serta klien pemasyarakatan.

1.4. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya

1. Apa yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk mencegah pengulangan tindak pidana?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana?

1.5. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang diatas, adapan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana langkah-langkah yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana;
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana.

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu hukum tentang pencegahan pengulangan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan.

1.6.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di lembaga pemasyarakatan.

2. Bagi Universitas Putera Batam

Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan bacaan di perpustakaan untuk teman-teman mahasiswa di Universitas Putera Batam.